

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

_____. *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta. 2016.

Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. FH UII Pers. Yogyakarta. 2008.

Amin, Rahman. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*. CV. Budi Utama. Yogyakarta. 2020.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.

_____. *Pemeberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Arto, Mukti. *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta. 2010.

Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Materil dan Formil di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. 2005.

Cinstanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006.

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2017.
- Djaja, Ermansjah. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2010.
- G, Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2007.
- Kadir, Muh. Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baksi, Bandung, 2004.
- Kaligis, OC. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni. Bandung. 2006.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Delapan Agenda Antikorupsi Bagi Presiden 2014-2019: Prakarsa tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, politik, kerakyatan dan pemerintahan*. KPK. Jakarta. 2014.
- Kristina, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Thafa Media. Yogyakarta. 2016.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Koede Etik Hakim dan Makalah berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, hlm. 2.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2007.

_____. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime*. PT. Alumni. Bandung. 2015.

_____. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Malang. 2014.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung. 2008.

Pradjonggo, Tandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Lawyer Club. Surabaya. 2010.

Prasetyo, Tegus. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Depok. 2017.

Rahmad, Rais Asra. *Hukum Acara Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok. 2019.

Ramadhana, Kurnia, dkk. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021 "Rendahnya Pidana Penajara dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara"*. Indonesia Corruption Watch. Jakarta. 2022.

Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2001.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.

Sulistiani, Lies. *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. 2009.

Surachmin dan Cahaya, Suhandi. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*. UII Press. Yogyakarta. 2006.

Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama. Surakarta. 2002.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Wijaya, Firman. *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Penaku. Jakarta. 2012.

Wisnubroto, AL. *Praktik Persidangan Pidana*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2014.

Yurizal. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Money Laundering*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Malang. 2021.

Jurnal Ilmiah

Ayu Diah P.S dan Ni Tengah A. Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 5. 2018.

- Beverly Evangelista dan Baiq Ishariaty Wika Utary. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Solid ASM*, Vol. 9 No. 2. Mataram, 2019.
- Budi Sastra Panjaitan. Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Keadilan*. Vol. 5 No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran. Asahan. 2018.
- C.D. Daleru. Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 124/Pid.Sus-Tpk/2015/PN. Jkt.Pst. *Lex Et Societas*. Vol. V No. 9. Maret 2017.
- Edward Samosir. Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mengadili Tindak Pencucian Uang. *Jurnal IUS Vol 4 No. 3*. Mataram. 2016.
- Hadi Alamri. Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*. Vol. V No. 1. Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2017.
- Husin Wattimana. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Tahkim*. Vol. 7 No. 2. Desember 2016.
- Jupri. Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi *Justice Collaborator* Perkara Korupsi. *Jurnal Transformative*. Vol. 4 No. 1. Maret 2018.
- Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 36, sebagaimana dikutip oleh A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, No. 2, Vol. 8, Denpasar: Universitas Mahasaraswati, 2018.
- Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Riview*, Vol. 5 No. 3, 2006.
- Naomi Sari. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ps): Studi Kasus Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Mdn. *Sign Jurnal Hukum*. Vol. 2 No.1. September 2020.

Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa. Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi. *Open Journal System*. Vol. 5 No. 2. 2016.

Rani Juwita. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *Jurnal Jom Fakultas Hukum*. Vol.3 No 2. Oktober 2016.

Syarifah Dewi Indawati, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan, *Jurnal Verstek Vol. 5 No. 2*, Surakarta, 2017.

Ulfa, Linda, dkk., Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2*, Banda Aceh, 2017.

Yunanto. Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7 No. 2. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Oktober 2019.

Makalah Seminar

Abdul Haris Semendawai. *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi; Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum. Yogyakarta, 17 April 2013.

Edward O.S Hiariej. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 30 Januari 2012.

Mas Achmad Santosa. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator. Diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juni 2011).

Syamsa Ardisasmita. “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel”. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 23 Agustus 2006.

Majalah

Fanani, Ahmad Zaenal. “Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan”. *Majalah Hukum Varia Peradilan No.380*. 2017.

Rujukan Elektronik

Ahmad Sofian, 14 Februari 2018, *Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. Diakses Pada 14 Mei 2022 Pukul 14.45 WIB.

Anonim, *Apa Yang Dimaksud Dengan Pemasaran?*, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemasaran/3515>. Diakses Pada 14 Mei 2022 Pukul 10.18 WIB.

Dalam versi Bahasa Inggris Undang-Undang Republik Albania Nomor 9205 tanggal 15 Maret 2004 tentang Perlindungan *Justice Collaborators* dan Saksi (Law No. 9205, http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw_questionnaireReplies/Albania%20legislation.pdf. Diakses Pada 15 Mei 2022 Pukul 16.32 WIB.

[DPR RI, 10 Februari 2020, Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan BNN: Bidang Hukum, Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan,](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K314ab17673fa5a41a2f0603bb1fdf065803.pdf)
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K314ab17673fa5a41a2f0603bb1fdf065803.pdf>, Diakses Pada 17 Juni 2022 Pukul 07.43 WIB.

Eddy O.S, 20 Agustus 2019, Percobaan Dan Pembantuan Dalam Delik Korupsi, <https://mediaindonesia.com/opini/254394/percobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi>, Diakses Pada 17 Juni 2022 Pukul 07.30 WIB.

Handar Subhandi, 22 November 2016, *Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertianperdagangan-orang-trafficking.html>, Diakses Pada 17 Juni 2022 Pukul 08.11 WIB.

Mahmud Kusuma. 20 April 2019. Tentang Tujuan Hukum. <https://www.hukumindo.com/2019/04/tentang-tujuan-hukum.html>. Diakses Pada 17 Juni 2022 Pukul 10.19 WIB.

Rika Lisnawati Tuanany, *Rangkuman Hukum Acara Pidana*, <https://play.google.com/books/reader?id=tV42EAAAQBAJ&pg=GBS.PA4>, Diakses Pada 4 Juli 2022 Pukul 21.18 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pidana (KUHP).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

_____, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

_____, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

